

Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Modal pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah

An Analysis of Capital Expenditure Fund Management at Human Settlements and Water Resources Office, Central Sulawesi Province

¹Aqnul Muhamad Akbar*, ²Burhanuddin, ³Guasmin
^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palu
(*Email Korespondensi: aqnulmuhammadakbar@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Modal pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah selama tiga tahun terakhir, terhitung Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode Anggaran Tahun 2016 sampai dengan Anggaran Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik analisis efektivitas yaitu dengan membandingkan anggaran belanja modal dengan realisasi anggaran belanja modal dikali 100% untuk menilai kinerja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat efektivitas pengelolaan anggaran belanja modal pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 dikatakan efektif, yaitu dengan memiliki rasio efektivitas rata-rata diatas 90%. Dengan demikian hasil kerja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah melalui penilaian BPKAD selama tiga Tahun Terakhir mendapat predikat dengan Nilai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan, Anggaran, Belanja Modal.

Abstract

This research aims to investigate the capital expenditure fund management at human settlements and Water Resources Office Central Sulawesi Province in Kind of Budget Realisation Report since 2016 to 2018. The data used are secondary data obtained from Human Settlements and Water Resources Office, Central Sulawesi Province for past three years since 2016 to 2018. This is a descriptive research using effectiveness analysis techniques, namely comparing the capital expenditure budget with the realization of the capital expenditure budget by 100% to assess the performance of the human settlements and Water Resources Office of Central Sulawesi Province. The results show that the level of effectiveness is effective with an average ratio above 90%. Thus, the work of the Human Settlements and Water Resources Office of Central Sulawesi through the BPKAD assessment for the past three years has been awarded the WTP (Fair Without Exception).

Keywords: Effectiveness, Management, Budget, and Capital Expenditure.

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset Negara dalam pengertian yang dimaksud PP No. 6 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administrasi semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset tetap (Barang Milik Negara), dengan bagaimana meningkatkan efektifitas dan menciptakan nilai tamba dalam mengelola aset tetap (Barang Milik Negara). Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (Keuangan Negara).

Kondisi dimana belum terinventarisasinya Barang Milik Negara dengan baik sesuai peraturan yang berlaku pada kementerian / lembaga Negara menjadi sasaran dalam penataan dan penertiban Barang Milik Negara. Arahnya dari langkah-langkah penertiban Barang Milik Negara (inventarisasi dan penilaian) tersebut adalah bagaimana pengelolaan aset Negara di setiap penggunaan barang menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga aset tetap (Barang Milik Negara) mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat / *Stake - Holder*.

Penyusunan anggaran merupakan tahap yang penting bagi instansi pemerintah yaitu membantu pelaksanaan dalam menetapkan program atau kegiatan dan memberikan gambaran mengenai besaran dana yang akan dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sehingga dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan. Anggaran dan realisasi memiliki keterkaitan yang memberikan gambaran apakah suatu instansi dapat dikatakan efektif atau tidak dalam penyerapan anggaran dan pembiayaan atas terlaksananya kegiatan dari instansi tersebut selama satu Tahun anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan dokumen yang bisa memberikan gambaran secara langsung tentang besarnya penyerapan anggaran belanja dengan realisasinya yang dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase.

Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak lepas dari pengelolaan APBD secara efektif dan efisien. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran belanja modal dengan melihat kebutuhan suatu daerah tersebut karena belanja modal merupakan salah satu keberhasilan dalam memberikan pelayanan bagi publik.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi penunjang terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

Tujuan umum pelaporan realisasi anggaran belanja modal adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelapor secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undang.

METODE

Dalam penulisan ini, metode analisis data yang dapat digunakan untuk menganalisis tingkat efektifitas belanja modal dengan cara membandingkan total anggaran belanja modal dengan total realisasi anggaran belanja modal.

Maka untuk menganalisis tingkat efektifitas pengelolaan anggaran belanja modal Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Modal}}{\text{Anggaran Belanja Modal}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud *Outcome* dalam penelitian ini adalah realisasi anggaran belanja modal dan *Output* adalah target anggaran belanja modal. Berikut kriteria efektifitas anggaran belanja modal sebagai berikut : 1) Jika hasil perbandingan lebih dari

100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif. 2) Jika pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif. 3) Jika pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatan cukup efektif. 4) Jika pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatan kurang efektif. 5) Jika pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatan tidak efektif.

HASIL

Analisis Pengelolaan Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis efektivitas pengelolaan anggaran belanja modal pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah bahwa Pengelolaan anggaran belanja modal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, oleh karena itu di dalam pengelolaan anggaran belanja modal Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah selalu melihat apa yang akan menjadi prioritas atau kebutuhan untuk suatu daerah tertentu dalam hal kebutuhan masyarakat, agar kehidupan masyarakat bisa lebih sejahtera. Dan di dalam pengelolaan anggaran belanja modal pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan dan pembinaan.

Perencanaan Anggaran

Perencanaan adalah sesuatu yang akan direncanakan tentang apa yang akan dicapai, yang kemudian memberikan pedoman, garis-garis besar tentang apa yang akan dituju. Perencanaan Anggaran Belanja Modal Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, SKPD Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran untuk periode lima tahun mendatang. dimulai dari perencanaan strategis, yaitu disusunnya rencana strategis SKPD (Renstra SKPD) Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 merupakan penjabaran dari peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. RPJMD 2016-2021 merupakan tahapan ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025.

Untuk itu renstra SKPD Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah merupakan acuan bagi bidang-bidang di lingkungan SKPD Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan, pemrograman dan penganggaran serta evaluasi kinerja antara lain RENJA, RKA dan LAKIP.

Dalam perencanaan anggaran belanja tertuang dalam rencana strategis (renstra) yang mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renstra merupakan perencanaan pada unit organisasi pemerintah daerah yaitu Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam penyusunannya harus sinkron dan berpodoman pada RKPD, renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Dokumen renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah memuat informasi tentang program kerja yang ingin dicapai dalam tahun berjalan. Indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya selain hal tersebut termuat pula penjelasan-penjelasan yang terkait dengan sasaran kebijakan dengan program serta yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.

Pelaksanaan anggaran adalah proses bagaimana melaksanakan atau merealisasikan apa yang sudah direncanakan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA). Pada dasarnya pelaksanaan anggaran Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah telah mengacu pada

peraturan menteri dalam negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah peraturan menteri dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pelaksanaan belanja harus dilaksanakan sesuai dengan rincian objek belanja yang ditetapkan. Apabila yang akan dibelanjakan berbeda dengan rincian objek dapat dilakukan mekanisme pergeseran anggaran. Demikian halnya dengan pergeseran anggaran dari objek belanja lainnya untuk pergeseran anggaran dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya atau antar program harus dengan persetujuan DPRD. Bila dikaitkan dengan persyaratan penerapan *performance based budgeting* yaitu klasifikasi pengeluaran ditetapkan berdasarkan program (*program based*), artinya rincian belanja dalam suatu program atau kegiatan hanya bersifat informasi saja dan tidak mengikat sehingga pelaksanaan belanja menjadi lebih fleksibel dan pengguna anggaran (*executive agencies*) tidak terkait dengan rincian belanja. Dengan demikian Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah masih menggunakan pendekatan line item budgeting dimana anggaran menyajikan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan input atau sumber daya yang digunakan.

Penatausahaan

Penatausahaan adalah serangkaian aktifitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini penatausahaan mencatat hal-hal penting dalam proses realisasi anggaran sampai kepada pertanggungjawaban berupa dokumentasi sebagai bukti pemanfaatan anggaran belanja modal dan terutama membantu memberikan informasi-informasi penting lainnya seperti posisi barang dan peralatan, jumlah barang yang merupakan hasil realisasi anggaran belanja modal.

Hasil dari setiap pencatatan, pengelolaan serta keterangan-keterangan yang dihimpun oleh bagian penatausahaan kemudian disimpan atau dijadikan pegangan untuk dijadikan bukti ketika ada pemeriksaan oleh pengawas terkait realisasi anggaran belanja modal.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahap pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Sedangkan tahap pertanggungjawaban adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam pelaporan pertanggungjawaban Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air Provinsi Sulawesi Tengah Sesuai dengan pp No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan berbasis Akruar.

Pelaporan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggambarkan sejauh mana kegiatan dilaksanakan yang merujuk pada data pelaporan yang akurat. Proses pelaporan dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atasnya dalam hal ini bendahara Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dari setiap SKPD.

Setiap pimpinan SKPD akan bertanggung jawab atas segala bentuk kegiatan yang dijalankan dan menghimpunnya dalam laporan pertanggung jawaban dengan melaksanakan pencatatan akuntansi, setiap SPJ yang terealisasi dari penerimaan dan pengeluaran kas disusun dalam bentuk laporan keuangan daerah Standar Akuntansi Berbasis Akruar, dimana penerimaan dan pengeluaran diakui ketika transaksi terjadi bukan ketika uang kas diterima atau dibayarkan. Proses ini akan menghasilkan laporan keuangan setiap SKPD yang terdiri dari : 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (LPSAL), 3) Neraca, 4) Laporan Operasional (LO), 5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 6) Laporan Arus Kas (LAK) dan 6) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Setiap SKPD akan melaporkan laporan pertanggung jawaban kepada bendahara Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Bendahara akan menginput semua laporan pertanggungjawaban tersebut untuk dikirim kepada bagian keuangan gubernur.

Anggaran yang diberikan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah kepada setiap SKPD harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku, setiap pertanggung jawaban yang diberikan harus merujuk pada data otentik

sehingga dapat diterima kebenarannya. Tanpa adanya data yang disertakan dalam pertanggungjawaban maka perlu di pertanyakan kebenarannya sehingga sangat diperlukan pertanggungjawaban secara operasional dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pertanggungjawaban yang dilakukan dimulai dari proses awal pelaksanaan belanja modal. Jika terjadi ketidakcocokan antara hasil pertanggungjawaban dengan bukti fisik belanja modal maka setiap SKPD harus bertanggungjawab atasnya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban setiap realisasi anggaran harus benar-benar diperhatikan penggunaannya sangat penting bagi setiap SKPD.

Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan perda APBD dilakukan oleh DPRD, selain pengawasan oleh DPRD ada 2 bentuk pengawasan keuangan daerah yang lain yaitu : 1) Pengawasan intern, dimana kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengawasan dilingkungan yang dipimpinnya. 2) Pengawasan intern dimana badan pemeriksa keuangan menjalankan proses pengawasan yang meliputi pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan adalah suatu usaha penertiban untuk menjamin terlaksananya segala ketentuan Undang-Undang, peraturan, keputusan kebijaksanaan, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pengawas pada setiap SKPD dimulai dari awal pelaksanaan belanja modal sampai selesai.

Setiap belanja modal baik untuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan harus diawasi oleh pengawas. Pengawas akan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan belanja modal agar dapat dijalankan sesuai kebijakan yang berlaku tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan serta mencegah pemborosan dan penyelewengan terhadap anggaran yang diberikan pemerintah.

Khusus untuk gedung, bangunan, jalan, dan jembatan pengawasan juga dilakukan oleh kontraktor agar setiap rincian bahkan bahan dan peralatan ataupun material dalam pengerjaan gedung, bangunan, jalan dan jembatan dapat terealisasi sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan mulai dari proses awal pengerjaan sampai selesai. Sedangkan pada tahap pengawasan, masih ditemukan kelalaian dari pihak pengawas yang mengakibatkan lamanya pembangunan dari waktu yang sudah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap gedung, bangunan, jembatan dan jalan sering terjadi kelalaian dari pihak pengawas sehingga kualitas yang dibangun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum maksimal. Pengawasan yang kurang maksimal ini mengakibatkan sering terjadi kecurangan dari para pekerja dan tukang yang menghemat segala kebutuhan pengerjaan agar mendapatkan keuntungan lebih. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam pembangunan. Padahal segala keperluan kebutuhan dalam pengerjaan gedung, bangunan, jalan dan jembatan sudah ditetapkan oleh pihak kontraktor. Dalam hal ini peran pengawasan diperlukan.

PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Belanja Modal

Efektivitas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola anggaran yang di berikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan meningkatkan PAD Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan meningkatnya PAD Provinsi Sulawesi Tengah maka akan bertambah anggaran yang akan di berikan pemerintah untuk Dinas Cipta Karya dan Provinsi Sulawesi Tengah khususnya belanja modal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah menganggarkan kebutuhan masyarakat melalui belanja modal.

Belanja modal Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas : 1) Belanja modal Tanah, 2) Belanja modal peralatan dan mesin. 3) Belanja modal bangunan dan geddung. 4) Belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan. 5) Belanja Aset tetap lainnya.

Dalam penelitian ini penulis hanya fokus pada tiga Anggaran belanja modal pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah yaitu : 1) Belanja modal peralatan dan mesin, 2) Belanja modal bangunan dan gedung dan 3) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

Untuk menganalisis efektivitas pengelolaan anggaran belanja modal Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja.

Efektivitas pengelolaan anggaran belanja modal Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah selama tiga tahun terakhir, terhitung Tahun 2016 – 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2018

Tahun	Anggaran Belanja Modal (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja Modal (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Efektivitas (%)
2016	Rp 25,985,103,482.00	Rp 25,686,408,060.00	Rp 298,695,422.00	98,85
2017	Rp 39,211,987,908.00	Rp 38,088,240,580.00	Rp 1,123,747,328.00	97,13
2018	Rp 55,010,462,381.00	Rp 53,242,912,390.00	Rp 1,767,549,991.00	96,79

Sumber Data: Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah

Dari tabel 1 dapat dilihat efektivitas anggaran belanja modal pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah tiap tahunnya mengalami peningkatan, hal tersebut tidak sejalan dengan pencapaiannya terhadap realisasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2016 anggaran belanja modal Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 25.985.103.482,00 yang terealisasi sebesar Rp. 25.686.408.060,00 atau 98,85 % dari anggarannya.

Pada tahun 2017 anggaran belanja modal Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 39.211.987.908,00 yang terealisasi sebesar Rp. 38.088.240.580,00 atau 97,13% dari anggarannya.

Pada tahun 2018 anggaran belanja modal Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 55.010.462.381,00 yang terealisasi sebesar Rp. 53.242.912.390,00 atau 96,79% dari anggarannya.

Dari table 1 terlihat bahwa anggaran belanja modal Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 – 2018 dikatakan efektif karena tingkat pencapaiannya lebih dari 90%, Adapun anggaran belanja yang tidak habis dibelanjakan pada tahun sebelumnya akan di jadikan sisa lebih pembiayaan (SILPA) dan akan digunakan di tahun berikutnya.

Berikut perhitungan rekapitulasi efektivitas realisasi anggaran belanja modal Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah selama 4 tahun terakhir, terhitung tahun 2016 – 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2018

Tahun	Jenis-Jenis Belanja Modal	Anggaran Belanja Modal (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja Modal (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Efektivitas (%)	kriteria
2016	Peralatan dan Mesin	Rp 1,989,148,560.00	Rp 1,910,786,260.00	Rp 78,362,300.00	96,06	Efektif
	Gedung dan Bangunan	Rp 197,465,000.00	Rp 197,465,000.00	Rp -	100,00	Efektif
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 23,618,489,922.00	Rp 23,578,156,800.00	Rp 40,333,122.00	99,83	Efektif
2017	Peralatan dan Mesin	Rp 1,646,012,858.00	Rp 1,552,431,260.00	Rp 93,581,598.00	94,31	Efektif
	Gedung dan Bangunan	Rp 229,000,000.00	Rp 228,130,000.00	Rp 870,000.00	99,62	Efektif
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 37,336,975,050.00	Rp 36,307,679,320.00	Rp 1,029,295,730.00	97,24	Efektif
2018	Peralatan dan Mesin	Rp 2,933,703,360.00	Rp 2,875,562,210.00	Rp 58,141,150.00	98,02	Efektif
	Gedung dan Bangunan	Rp 995,902,000.00	Rp 995,902,000.00	Rp -	100,00	Efektif
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 55,080,857,021.00	Rp 49,371,448,180.00	Rp 5,709,408,841.00	96,65	Efektif

Sumber Data: Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah

Dari Tabel 2 terlihat bahwa Anggaran Belanja Modal Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah tiap tahunnya mengalami fluktuatif, hal tersebut sejalan dengan tingkat pencapaiannya terhadap realisasi yang mengalami kondisi yang sama. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2016 anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.989.148.560.00 yang terealisasi sebesar Rp. 1.910.786.260.00 atau 96,06% dari anggaran belanja modal peralatan dan mesin. Untuk anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 197.465.000.00 yang terealisasi sebesar Rp. 197.465.000.00 atau 100,00% dari anggaran belanja modal gedung dan bangunan. Dan untuk anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 23.618.489.922.00 yang terealisasi sebesar Rp. 23.578.156.800.00 atau 99,83% dari anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Jika di lihat dari anggaran belanja modal tahun 2016 sebesar Rp. 25.985.103.482.00 dan yang terealisasi sebesar Rp. 25.686.408.060.00 atau 98,85% dari anggaran belanja modal. Dapat disimpulkan bahwa Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan anggaran belanja modal tahun 2016 mengalami sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp. 298.695.422.00.

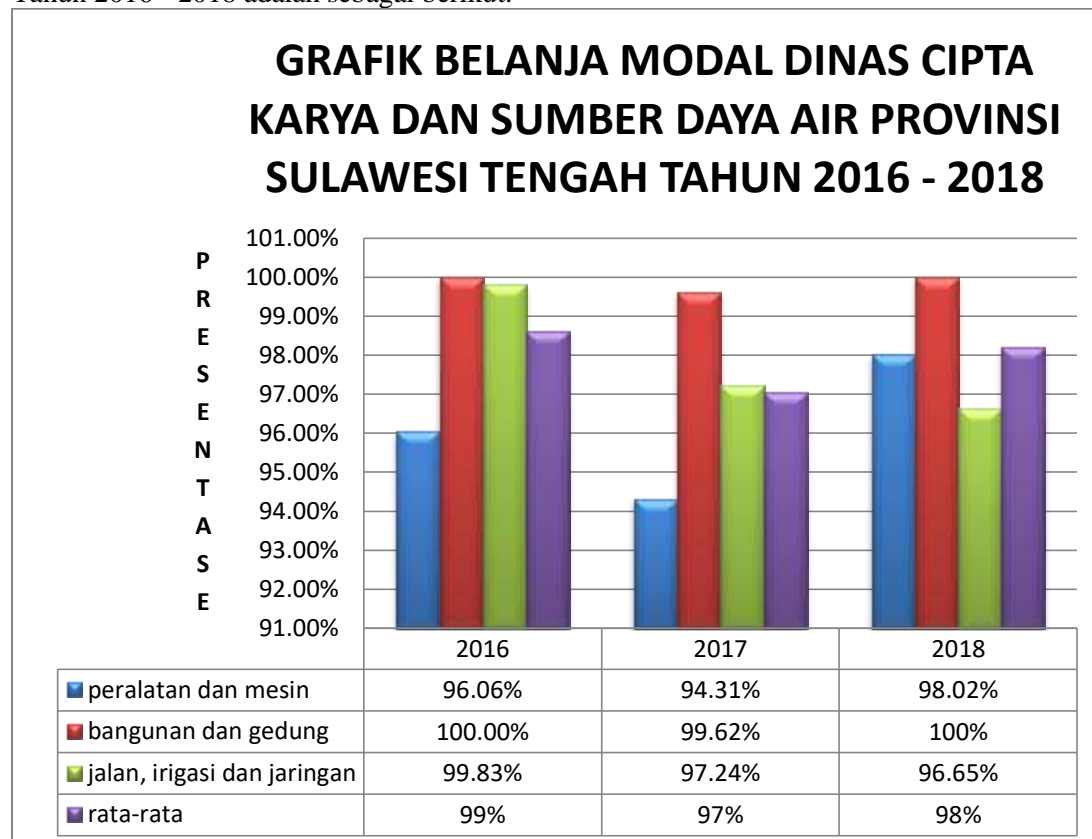
Pada tahun 2017 anggaran belanja modal peralatan dan mesin mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.646.012.858.00 dan mengalami penurunan realisasi sebesar Rp. 1.552.431.260.00 atau 94,31% dari tahun sebelumnya. Untuk anggaran belanja modal gedung dan bangunan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 229.000.000.00 dan mengalami penurunan realisasi sebesar Rp. 228.130.000.00 atau 99,62% dari tahun sebelumnya. Dan untuk anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 37.336.975.050.00 dan mengalami penurunan realisasi sebesar Rp. 36.307.679.320.00 atau 97,24% dari tahun sebelumnya. Jika di lihat dari anggaran belanja modal tahun 2017 sebesar Rp. 39.211.987.908.00 dan yang terealisasi sebesar Rp. 38.088.240.580.00 atau 97,13% dari anggaran belanja modal. Dapat disimpulkan bahwa Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan anggaran belanja modal tahun 2017 mengalami sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp. 1.123.747.328.00.

Pada tahun 2018 anggaran belanja modal peralatan dan mesin mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 2.933.703.360.00 dan mengalami peningkatan realisasi sebesar Rp. 2.875.562.210.00 atau 98,02% dari tahun sebelumnya. Untuk anggaran belanja modal gedung dan bangunan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 995.902.000.00 dan

mengalami peningkatan realisasi sebesar Rp. 995.902.000.00 atau 100,00% dari tahun sebelumnya. Dan untuk anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 51.080.857.021.00 dan mengalami penurunan realisasi sebesar Rp. 49.371.448.180.00 atau 96,65% dari tahun sebelumnya. Jika di lihat dari anggaran belanja modal tahun 2018 sebesar Rp. 55.010.462.381.00 dan yang terealisasi sebesar Rp. 53.242.912.390.00 atau 96,79% dari anggaran belanja modal. Dapat disimpulkan bahwa Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan anggaran belanja modal tahun 2018 mengalami sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp. 1.767.549.991.00.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Nurhasanah SE MM, selaku kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, pada hari Senin 09 maret 2020, “dalam penyerapan anggaran belanja modal Peralatan & Mesin tidak dapat dilakukan secara 100%, hal tersebut disebabkan karena anggaran yang telah ditetapkan untuk belanja modal Peralatan & Mesin di bagi untuk pembiayaan kegiatan lain sehinga serapan realisasi tidak dapat mencapai 100%, hal tersebut berbanding terbalik dengan belanja modal Jalan, Irigasi & Jaringan dan gedung & bangunan yang harus selesai 100% adapun kendala dalam merealisasikan kegiatan tersebut yaitu keterbatasan waktu di dalam pengerjaanya dan keterlambatan penetapan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah”.

Diagram peningkatan atau penurunan tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Modal Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah selama tiga tahun terakhir, terhitung Tahun 2016 - 2018 adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Diagram Peningkatan Atau Penurunan Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Modal

Pada gambar 1 terlihat pola perkembangan Efektivitas Anggaran Belanja Modal Pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Tahun 2016 sampai Tahun 2018 cenderung stabil, ditunjukkan dengan tingkat Efektivitas rata-rata pertahun diatas 90% yang berarti Anggaran Belanja Modal Pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah sudah efektif. Dan melalui pencapaian tersebut Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah melalui penilaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam hal pengelolaan anggaran belanja modal yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tiga tahun terakhir.”

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan 1) Bahwa Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal pengelolaan anggaran belanja modal selama tiga tahun terakhir, terhitung tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2) Dalam perencanaan anggaran belanja modal Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah harus mengacu pada renstra CIKASDA untuk periode lima tahun mendatang dan dalam penyusunannya harus sinkron dan berpedoman pada RKPD, RPJMD dan RPJPD. 3) Rekapitulasi Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal selama tiga tahun terakhir. Terhitung Tahun 2016 – 2018 dengan presentase rata-rata diatas 90 %. Dalam hal ini bahwa Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikatakan berhasil dalam pengelolaan anggaran belanja modal dikarenakan rata-rata tiap tahunnya diatas 90%.

SARAN

Rekomendasi saran 1) Bagi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah diperlukan adanya perhatian yang khusus dan serius agar dapat meningkatkan kinerja dalam pengalokasian belanja modal yang tepat. 2) Menjadi masukan bagi pihak pengambilan keputusan pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, Dalam hal penetapan anggaran harus dilakukan tepat waktu sehingga tidak menimbulkan keterlambatan dalam merealisasikan anggaran belanja modal. 3) Mempertahankan kinerja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah agar kedepannya bisa lebih baik lagi dan mempertahankan penilaian dari BPKAD yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Agus, Sartono. 2011. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : BPFE.
- Ariel. 2013. **Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin**. *Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3, Hal.74:81*
- Balderton. 2011. (dalam Adisasmita, 2011:21) **Pengertian Pengelolaan**.
- Basri, ramlan. 2013. **“Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD provinsi Sulawesi Utara”** *Jurnal Emba ISSN 2304 – 1174. Vol 2, Hal 952-961.*
- Darsono. 2010. **Manajemen Keuangan**. Jakarta : *consultan accounting*.
- Fahmi, Irham. 2013. **Analisis Laporan Keuangan**. Bandung : Alfabeta.
- Fahrianta, Riswan dan Carolina. 2012. **“Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas”** *Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Vol 13, No.1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Banjarmasin.*
- Frederich Oscar. Lontoh Lindarwati. (2004). **Jurnal Widya Manajemen & Akuntansi**. Vol 4.
- George R. Terry 2011:3. *dalam buku Principles of Management* di terjemahkan oleh Sukarna.
- George R. Terry, 1958. *Principles of Management*
- Gie, The Liang. 2001. *Administrasi Perkantoran. Edisi Revisi. Bandung : Mandar Maju.*
- Indra, Rahmat, Mahsun dan Hasibuan. 2008. **Pengertian Efektivitas dan Pengukuran Efektivitas**, Jakarta : Salemba Empat
- Irham, Fahmi, 2011. **Analisis Kinerja Keuangan**. Alfabeta, Jakarta.
- Julita, 2013, **Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara**. Skripsi. Tidak dipublikasikan. Universitas. Gajah Mada Yogyakarta.
- Kasmir. (2010). **Pengantar Manajemen Keuangan**. Jakarta . Kencana Prenada Media Group.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 **Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**.
- Lexy J. Moleong, 2005:6,5. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: Remaja Rosdayakarya.
- Mahmudi. (2010). **Manajemen Sektor Publik**. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudin. 2010. **Rumus Menghitung Anggaran Realisasi Belanja Modal**, Edisi 4, Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. **Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Bitung**. *Jurnal EMBA 1 V 3 (1), 1-12.*

- Pemerintah Republik Indonesi, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 **Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.**
- Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti. 2012. **Dasar – Dasar Manajemen Keuangan.** Edisi Keenam Cetakan Pertama. Yogyakarta : UPP STIM YPKN.
- Sugiyanta, 2016 **Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Indonesia,** Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol. 14.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2011:15. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Setia Mulyawan, 2015. *Manajemen Keuangan,* Pustaka Setia, Bandung.
- Windari Ayu. 2015. **Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palembang.** Skripsi. Universitas IBA Palembang.